BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori tentang Keadilan dalam Hukum Waris Islam

2.1.1 Definisi dan Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online pengertiannya adalah, “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil”.¹⁴ Adil menurut bahasa Arab seperti yang diungkapkan oleh Syamsuri:

“Adil di sebut dengan kata *‘adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al’adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama”.¹⁵

Muhammad Harfin Zuhdi, dalam bukunya “Hukum Keadilan dan Peradilan dalam Islam”, menjelaskan lebih lanjut konsep keadilan, sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut:

“Menurut Drs. Kahar Masyhur, bahwa terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu: (1) Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya; (2) Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; dan (3) Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang

¹⁴KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III “Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud”, <http://kbbi.web.id/adil>, di akses pada 11 Maret 2025

¹⁵Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam Untuk SMA Kelas XII*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 100

sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.¹⁶

Muhammad Harfin Zuhdi juga menguraikan pemikiran Aristoteles, John Rawls dan Hans Kelsen mengenai keadilan yaitu:

1. “Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada, Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum, baginya keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional, kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”, keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya”.¹⁷
2. “John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama adalah memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua yaitu mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel, dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu”.¹⁸
3. “Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian “keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa”.¹⁹

¹⁶Muhammad Harfin Zuhdi, *Hukum Keadilan dan Peradilan Dalam Islam*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2023), hal. 255

¹⁷*Ibid*, hal. 257

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*, hal. 257-258

Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnin Harahap, dalam bukunya “Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia”, menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara hukum Islam dan hukum umum. Kutipan berikut menguraikan cakupan hukum Islam yang lebih luas dibandingkan dengan hukum konvensional:

“Hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya mengatur hubungan sosial antar individu dalam masyarakat tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan Allah SWT, Hukum Islam bertujuan agar manusia bertindak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga aspek moral dan ibadah juga termasuk dalam cakupannya. Hukum dalam pengertian umum hanya mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat (*odening van het social leven*), prinsip *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) menegaskan bahwa hukum muncul karena adanya interaksi sosial dan konflik kepentingan (*conflicts of human interest*), dengan kata lain yaitu hukum dalam sistem non-Islam lebih berorientasi pada penyelesaian konflik dan pengaturan hubungan sosial”.²⁰

“Hukum dalam pengertian umum dimana aturan yang hanya mengatur kehidupan pribadi seseorang tidak dianggap sebagai hukum, melainkan sebagai norma sosial, moral, atau agama, namun dalam hukum Islam, aturan yang bersifat pribadi (misalnya, kewajiban shalat, puasa, atau kebersihan diri) tetap memiliki kedudukan hukum karena berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Hukum Islam lebih komprehensif karena mencakup aspek sosial dan individu, sedangkan hukum dalam konsep umum lebih berfokus pada kehidupan bermasyarakat”.²¹

Menurut Agung Eko Purwana, konsep keadilan dalam Islam berdasarkan *Al-Qur'an* menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana dalam kutipan berikut:

“Keadilan merupakan nilai dasar dari Islam yang banyak disebut dalam *Al-Quran* lebih dari 1000 kali, dalam *Al-Quran*, ayat-ayat yang membahas tentang keadilan dapat dijumpai dengan istilah *al adl*, *al qist*, *al mizan*, dan *al hukm*. Kata *al adl* yang berarti bersifat adil disebutkan sebanyak 28 kali, *al qist* yang berarti perbuatan yang adil disebutkan sebanyak 25 kali,

²⁰Abdul Ghofur Anshori, *et.al*, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008) hal. 31

²¹*Ibid*

al wazn yang berarti ukuran atau timbangan yang adil disebutkan sebanyak 20 kali, dan *al hukm* atau *al hakim* yang berarti melaksanakan perbuatan yang adil disebutkan lebih dari 150 kali.”²²

“Pengertian keadilan adalah memberikan hak kepada pemiliknya tanpa memihak, tanpa diskriminasi, kemudian meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Konsep keadilan dalam *Al-Quran* diletakkan secara jelas tidak ada kompromi dan diskriminasi. Setiap manusia diperintahkan semaksimal mungkin untuk selalu obyektif terhadap keputusan yang akan diambil, menghindari sikap sentimen kesukuan, kebencian dalam memutuskan suatu perkara sehingga dapat bersikap adil. Apabila seseorang berlaku adil maka ia akan lebih dekat kepada kebaikan yang sempurna, sebaliknya jika tidak berlaku adil maka kebaikan akan makin jauh dari kehidupannya”.²³

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Wawasan *Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i* atas Pelbagai Persoalan Umat”, keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam, yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan pemberian hak kepada setiap individu. Keadilan dalam berbagai makna adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam arti sama (*Equality*): Menekankan kesetaraan di antara semua orang, tanpa memandang status sosial, agama, atau ras. Persamaan yang dimaksud adalah “persamaan dalam hak”, sebagaimana dalam *QS. Al-Nisa* (4): 58. Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

2. Keadilan dalam arti seimbang (*Proportionality*): Menekankan proporsi yang tepat dalam pemberian hak dan kewajiban. Ayat terkait dengan ini adalah *QS. Al-Infithār* (82): 6-7. Artinya:

²²Agung Eko Purwana, “*Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*”, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), hal. 31

²³*Ibid*

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang”.

3. Keadilan dalam arti memberikan hak (*Justice*): Memberikan hak kepada pemiliknya dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang pantas.

Bersikap adil dalam bentuk berbuat kebajikan di atur dalam *QS. An-Nahl* (16):

90. Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

4. Keadilan *Ilahi* (*Divine Justice*): Keyakinan bahwa Allah akan memberikan keadilan di akhirat, di mana setiap orang akan menerima balasan atas perbuatannya. Sifat Allah yang paling hakiki adalah “Adil”. Dalam *QS. Ali*

Imrān (3): 18. Artinya:

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa, menjaga kejujuran dalam setiap interaksi dan transaksi, memberikan hak-hak orang lain tanpa menunda atau menahan hak mereka, memberikan penghargaan yang sesuai kepada rekan kerja dan menghargai kontribusi orang lain. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama bisa dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain.

Menurut Rohidin, keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan dengan Tuhan dan alam, yang pada membawa seseorang kepada ketakwaan, sesuai kutipan berikut:

“Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan (memberikan lebih dari yang seharusnya), keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar, hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT”.²⁴

Perspektif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah konsep fundamental yang menekankan kesamaan, keseimbangan, dan pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi hubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan alam, dengan tujuan mencapai ketakwaan.

Hukum konvensional lebih berfokus pada pengaturan sosial dan penyelesaian konflik, hukum Islam juga menekankan aspek moral dan ibadah. Berbagai teori keadilan dari Aristoteles, Rawls, dan Hans Kelsen memberikan dimensi filosofis yang melengkapi pemahaman tentang pentingnya keadilan sebagai landasan hukum dan kehidupan bermasyarakat.

²⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 23-24

2.1.2 Pendekatan Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Islam

Abdurrahman dalam bukunya “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, serta Mardani dalam bukunya “Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”, menjelaskan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara pelaksanaan hukum waris Islam dan prinsip ketuhanan dalam sistem hukum Indonesia. Kutipan berikut menguraikan lebih lanjut hubungan tersebut:

“Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila sila yang pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya penduduk negara Indonesia adalah manusia yang beragama dan percaya kepada Tuhan Allah yang satu (*Tauhid*)²⁵”, “realisasi dari kepercayaan tersebut berupa ketaatan pada perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 29, yang menjelaskan bahwa negara menjamin bagi tiap-tiap penduduk untuk percaya kepada Tuhan dan beribadah atau menjalankan ajarannya sesuai dengan Kepercayaannya”.²⁶

Kutipan tersebut diatas dapat dipahami sebagai, negara memberikan perlindungan hukum bagi orang Islam, untuk menjalankan ajaran agamanya termasuk menggunakan Hukum Waris Islam, sebagai pedoman hukum dalam pembagian harta warisan.

Abdurrahman menjelaskan lebih lanjut mengenai peran *Ijtihad* (upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam (*Mujtahid*) untuk menggali dan menetapkan hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang belum secara jelas diatur dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*) dan kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam kutipan berikut:

²⁵Abdurrahman, *Op.Cit.*, hal. 3

²⁶Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 163

“Dasar hukum kewarisan Islam selain terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* juga terdapat dalam *Ijtihad* ulama, proses *Ijtihad* bertujuan menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*, karenanya hanya para ulama yang dapat ber-*Ijtihad* terkait hukum Islam, di Indonesia hukum kewarisan Islam menjadi bagian dalam hukum nasional. Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia mengalami kemajuan seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat untuk mengamalkan hukum Islam, oleh karena itu diperlukan landasan hukum supaya umat Islam mendapat kepastian dalam melaksanakan hukum waris Islam tersebut. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No.1/1991 menetapkan, bahwa KHI merupakan kumpulan pendapat para ahli hukum Islam (*Mujtahid*) yang sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia, untuk digunakan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hukum Islam termasuk waris islam”.²⁷

Hukum waris Islam di Indonesia telah diakui sebagai hukum positif, dengan penyelesaian sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Agama, KHI juga menegaskan aturan mengenai peralihan hak waris, memberikan kepastian hukum bagi umat Islam. Ahmad Rofiq menjelaskan lebih lanjut tentang peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris serta konsep hukum waris Islam sebagaimana diuraikan dalam kutipan berikut:

“Apabila ada permasalahan tentang hukum waris Islam, maka ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dapat menggugat di Pengadilan Agama, karena lembaga inilah yang dipercaya pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan orang Islam termasuk hukum waris. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto (jo) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan demikian hukum waris Islam telah menjadi hukum positif yang harus dijadikan pedoman oleh orang Islam ketika menyelesaikan permasalahan hukum waris Islam”.²⁸

“Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan

²⁷Abdurrahman, *Op.Cit*, hal. 14

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 374

dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup”.²⁹

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta pewaris kepada ahli waris dengan prinsip keadilan berimbang. Pembagian warisan mempertimbangkan tanggung jawab masing-masing ahli waris, di mana laki-laki menerima bagian lebih besar karena kewajibannya dalam keluarga. Zainuddin menguraikan lebih lanjut mengenai hal ini, sebagaimana kutipan berikut:

“Hukum waris Islam berlaku ketika ada orang Islam meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, dimana harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu secara otomatis jatuh atau berpindah ke ahli waris, apabila tidak ada ahli waris maka harta warisan itu berpindah ke *Baitul Mal* atau diserahkan ke negara untuk digunakan oleh masyarakat. Hukum waris itu muncul jika ada pewaris (orang yang meninggal dunia), ahli waris (saudara yang ditinggalkan), *Tirkah* (harta warisan) dan tidak ada penghalang ahli waris menerima harta warisan, yang menghalangi ahli waris menerima warisan yakni ahli waris membunuh pewaris dan ahli waris tidak islam atau murtad dan hal ini diatur dalam pasal 173 KHI”.³⁰

“Harta warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari tanggung jawab ahli waris terhadap keluarganya, sehingga perbedaan kewajiban juga akan menentukan warisan yang diterima. Merujuk pada ketentuan syariat Islam tentang perkawinan, seorang laki-laki bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, menafkahi kebutuhan hidup dan istrinya, sehingga sebagai lanjutan dari tanggung jawab tersebut, maka melalui asas keadilan berimbang, ahli waris laki-laki akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan”.³¹

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Mawaris Edisi Revisi*”, keadilan pembagian waris menurut Islam menekankan pada hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, namun dengan proporsi yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai pendekatan keadilan dalam pembagian waris menurut Islam:

²⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 112-113

³¹*Ibid*

1. Keadilan berimbang, bukan merata:

“Keadilan dalam pembagian waris Islam bukan berarti memberikan bagian yang sama persis kepada setiap ahli waris, melainkan keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing”.

2. Hak yang sama, bagian yang berbeda:

“Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi, namun bagian yang mereka terima bisa berbeda. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan”.

3. Tanggung jawab yang berbeda:

“Laki-laki memiliki tanggung jawab utama untuk menafkahi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama”.

4. Keadilan dalam pembagian:

“Pembagian waris harus dilakukan secara adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan hak-hak masing-masing ahli waris”.

5. Wasiat:

“Wasiat (perintah) yang dibuat oleh pewaris dapat mempengaruhi pembagian waris, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan”.

6. Pentingnya keadilan:

“Keadilan dalam pembagian waris adalah kewajiban agama, dan pelanggaran dapat memiliki konsekuensi hukum dalam Islam, dimana merujuk pada akibat atau dampak yang timbul dari pelanggaran atau kepatuhan terhadap hukum Islam (*Syariat*), konsekuensi ini bisa bersifat duniawi (di dunia) maupun *ukhrawi* (di akhirat / kehidupan setelah kematian)”.

7. Asas Keadilan:

“Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris”.

QS. An-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa “bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan”, kemudian KHI pasal 176 menjelaskan bahwa “bagian antara laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu, bertitik tolak dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa garis hukum bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1 (dua banding satu)”.

Perbandingan 2:1 (dua banding satu) tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan anak perempuan, juga antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, dan antara saudara kandung. Jumlah bagian yang diperoleh pada saat menerima hak memang ada perbedaan, namun bukan karena tidak adil, karena menurut Islam tidak hanya diukur dari jumlah yang diperoleh ketika menerima warisan, tetapi juga dalam kaitannya dengan tujuan penggunaan dan kebutuhan.

Hal ini menunjukkan bahwa harus selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara apa yang diterima seseorang dan kewajiban apa yang harus dilakukan, misalnya laki-laki dan perempuan dengan kewajibannya di masa depan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Waris Islam dimana warisan yang diterima ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari tanggung jawab ahli waris terhadap keluarganya, pada umumnya laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu dirinya dan keluarga.

Apabila dibandingkan dengan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 176 KHI yang berbunyi:³²

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal diatas mengandung garis hukum:

1. Apabila anak hanya satu dan perempuan, maka mendapat 1/2 (satu per dua) bagian.
2. Apabila anak hanya perempuan dan lebih dari satu, mereka bersama-sama mendapat 2/3 (dua per tiga) bagian.
3. Jika anak perempuan bersama anak laki-laki, maka warisan dibagi dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu), di mana anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan.”

“Pasal 176 KHI diatas mengikuti ketentuan dari *QS An-Nisa* 4:11, aturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimana hak waris diatur sejalan dengan beban tanggung jawab masing-masing pihak”.

Laki-laki menerima bagian lebih besar karena beban kewajiban yang lebih besar, seperti menafkahi keluarga, memberikan mahar saat menikah, serta memenuhi kebutuhan orang tua dan kerabat yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa kewajiban yang menjadi dasar mengapa anak laki-laki memperoleh bagian warisan lebih besar menurut Ahmad Bisyr Syakur :³³

“Kedudukan anak laki-laki sangat kuat dalam hukum kewarisan Islam, keberadaannya dapat menutup ahli waris bukan utama untuk menerima harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak dari pada perempuan, bukan berarti itu tidak adil, karena adil merupakan penempatan sesuatu pada tempatnya, termasuk memberikan bagian warisan pada laki-laki lebih banyak karena kewajibannya juga lebih banyak, antara lain:

1. Mencukupi nafkah berupa sandang, pangan, papan bagi istri dan anaknya, termasuk kebutuhan rumah tangga.

³²Mardani, *Op.Cit*, hal. 152

³³Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), hal. 43

2. Memelihara kerabat lain atau mencukupi kebutuhannya, apabila lemah, misalnya orang tua, saudara perempuan.
3. Memberikan mahar ketika akan menikahi seorang perempuan.
4. Memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* ketika menceraikan istrinya.
5. Memberikan biaya perawatan, kesehatan dan pendidikan anaknya.”

Hak kebendaan perempuan dalam Islam bersifat individual dan tidak memiliki kewajiban untuk dibagikan kepada pihak lain, Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai hak-hak kebendaan yang diperoleh perempuan sesuai kutipan berikut:³⁴

“Kewajiban perempuan dalam rumah tangga hanya sebatas non materi/tidak kebendaan, yang diperoleh perempuan terhadap hak kebendaan antara lain:

1. Apabila telah menikah, maka mendapatkan nafkah dari suami.
2. Apabila belum menikah, maka yang mencukupi segala kebutuhannya adalah orang tuanya sampai dewasa/mandiri atau menikah.
3. Apabila telah dewasa/mandiri tetapi belum menikah dan kaya, maka segala kepemilikannya adalah hak penuh miliknya.
4. Apabila telah dewasa/mandiri tetapi belum menikah dan tidak mampu, maka segala biaya kebutuhan hidupnya yang menanggung orang tua dan saudara laki-laki atau kerabatnya.
5. Apabila telah tua dan mempunyai anak dan tidak mampu, maka yang mencukupi segala kebutuhannya adalah anak-anaknya.”

“Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kepemilikan harta bagi perempuan bersifat individual, artinya harta benda tersebut milik penuh perempuan dan menurut hukum tidak ada kewajiban untuk diberikan kepada yang lain, begitu juga ketika perempuan menerima harta warisan maka harta warisan tersebut adalah miliknya penuh. Pernyataan ini dapat dikatakan bahwa apabila para perempuan menerima setengah bagian dari satu bagian milik laki-laki, hal itu sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu keadilan berimbang, penerimaan harta warisan sesuai dengan hak dan kewajibannya”.

Ahmad Zahari menjelaskan bahwa keadilan tidak diukur dari kesetaraan, tetapi dari kewajiban masing-masing individu, oleh karena itu anak laki-laki

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 333

menerima bagian lebih besar karena memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga, sebagaimana kutipan berikut: ³⁵

“Pada hukum waris Islam, asas keadilan berimbang mengacu pada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan hak waris dengan kewajiban atau beban hidup yang ditanggung atau dipenuhi oleh ahli waris, oleh karena itu, rasa keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur dari derajat persamaan di antara para ahli waris, tetapi dari derajat beban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, mengenai keadaan umum atau kehidupan manusia”.

“Konsep keadilan apabila dianalisis, maka dalam hukum waris Islam menganut keadilan distributif (*justicia distributiva*) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atau pembagian menurut hak-haknya masing-masing. Hak diberikan sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, begitu juga dalam pemberian bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki mendapatkan hak menerima bagian warisan lebih banyak karena kewajibannya yang diembannya juga banyak”.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 melindungi pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia. Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa diakui negara untuk menjalankan Hukum waris Islam dengan KHI, wewenang yang tertuang dalam KHI yaitu mengatur peralihan harta pewaris kepada ahli waris berdasarkan prinsip keadilan berimbang, bukan kesetaraan absolut.

Pembagian warisan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, di mana laki-laki umumnya menerima bagian lebih besar karena tanggung jawab finansial yang lebih besar terhadap keluarga, sementara harta perempuan bersifat individual tanpa ada kewajiban untuk dibagikan kepada keluarga, keadilan dalam hukum waris Islam merupakan keseimbangan antara hak waris yang diterima dengan tanggung jawab yang diemban oleh setiap ahli waris.

³⁵Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hal. 25

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Waris dalam Islam

2.2.1 Konsep Dasar Hukum Waris dalam Islam (Ilmu *Faraidh*).

Hukum waris dalam Islam dikenal dengan istilah ilmu *Faraidh*, kata *Faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *Faridah* yang berasal dari kata *Fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).³⁶ Menurut Ahmad Rofiq, KHI menetapkan aturan tentang perpindahan harta pewaris kepada ahli waris yang berhak sesuai *Syariat* (aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT), sebagaimana dalam kutipan berikut:

“Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup”.³⁷

Teungku Muhammad Hasby As-Shiddiqi menjelaskan bahwa ilmu waris mencakup siapa yang berhak mewarisi, bagian masing-masing ahli waris, dan cara pembagiannya yaitu:³⁸

“Ilmu yang dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya, sehingga ilmu *Faraidh* mencakup tiga unsur penting di dalamnya:

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris.
2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.”

Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis”, dasar hukum Ilmu

³⁶Louis Makluf, *Al Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam* (Beirut: Dar Masyriq, 1986), hal. 577

³⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi, Op.Cit*, hal. 4

³⁸Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2001), hal.5

Faraidh adalah *Al-Quran* (Surah *An-Nisa* ayat 7, 11-12, 176), *Hadits* (segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah *Al-Qur'an*, berfungsi sebagai penjelas dan pedoman hidup bagi umat Islam), dan *Ijtihad* atau kesepakatan para ulama. Aturan inilah yang dijadikan pedoman untuk melakukan pembagian warisan.

1. Al-Qur'an

a. QS.An-Nisa[4]:7 :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta warisan ibu-bapak dan kerabatnya, bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari warisan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

“Isi kandungan ayat di atas adalah: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada pula hak untuk mereka dari kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak. Setiap bagian laki-laki dan perempuan sudah ditentukan hak nya oleh Allah.”

b. QS.An-Nisa [4]:11 :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Isi kandungan ayat diatas adalah menjelaskan tentang:

1) Warisan untuk anak

- a) Seorang anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.
- b) Anak perempuan dan lebih dari dua, maka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari harta warisan.
- c) Satu anak perempuan, maka mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta warisan.

2) Warisan untuk orang tua

- a) Pewaris (orang yang meninggal) memiliki anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari harta warisan.
- b) Pewaris tidak memiliki anak, dan hanya meninggalkan kedua orang tua, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian, dan sisanya untuk ayah.
- c) Pewaris memiliki beberapa saudara (seayah-seibu, seayah, atau seibu), maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, sisanya untuk ayah.

3) Aturan lain yang harus dilakukan

- a) Pembagian ini dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh pewaris dan setelah hutang dilunasi.
- b) Aturan waris ini merupakan ketetapan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

c. QS.An-Nisa[4]:12 :

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.” “Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Penjelasan ayat ini adalah pembagian warisan bagi suami, istri, dan saudara seibu dalam Islam. yaitu:

- 1) Bagian suami atas warisan istri
 - a) Apabila istri meninggal tanpa anak, suami mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta yang di tinggalkan.
 - b) Apabila istri meninggal dengan anak, suami mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta yang ditinggalkan.
 - c) Pembagian dilakukan setelah dipenuhinya wasiat yang dibuat oleh istri dan setelah dilunasinya hutang.
- 2) Bagian istri atas warisan suami
 - a) Apabila suami meninggal tanpa anak, istri mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta yang ditinggalkan.

- b) Apabila suami meninggal dengan anak, istri mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta yang ditinggalkan.
- c) Pembagian dilakukan setelah dipenuhinya wasiat yang dibuat oleh suami dan setelah dilunasinya hutang.

3) Bagian warisan untuk saudara seibu

- a) Pewaris meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing saudara mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari harta warisan.
- b) Apabila saudara seibu lebih dari satu orang, maka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian, rata di bagi antara mereka.
- c) Pembagian dilakukan setelah wasiat dijalankan dan hutang pewaris di lunasi, tanpa menyusahkan ahli waris lainnya.

d. *QS.An-Nisa[4]:176* :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini mengenai hukum waris kasus *Kalalah*, yaitu pewaris yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Berikut adalah aturan pembagian warisannya:

- 1) Pewaris memiliki satu saudara perempuan

Saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta yang ditinggalkan.

- 2) Pewaris memiliki satu saudara laki-laki

Saudara laki-laki mewarisi seluruh harta, apabila pewaris tidak memiliki anak.

- 3) Pewaris memiliki dua saudara perempuan atau lebih

Bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari harta yang di tinggalkan.

- 4) Jika pewaris memiliki saudara laki-laki dan perempuan

Pembagian mengikuti aturan “laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan”, sesuai prinsip yang berlaku dalam warisan Islam.

2. *Al-Hadits*

Sumber hukum kedua setelah *Al-Qur'an* adalah *Hadits* yang memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit yang menguatkan hukum dalam *Al-Qur'an*, dan membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam *Al-Qur'an*. Fungsinya sebagai pemberi bentuk konkrit dari *Sunnah* (merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad) dalam bidang kewarisan misalnya, *Hadits* yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas (para sahabat

Nabi Muhammad) yang menyatakan bahwa, alangkah baiknya kalau manusia mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat, karena sabda Nabi Muhammad yaitu boleh sepertiga tetapi sepertiga itu sudah cukup banyak. *Hadits* ini mengajarkan bahwa wasiat boleh diberikan, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta, maksudnya agar ahli waris tetap mendapatkan bagian mereka dengan adil, karena wasiat dalam Islam tidak boleh digunakan untuk mengurangi hak waris seseorang.

Rasulullah SAW bersabda: “bagilah harta warisan kepada ahli waris (*ashabul furudh*) sesuai dengan ketentuan *Al-Qur-an*, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat (*Hadits* Riwayat (HR).Muslim)”, “berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (HR.Bukhari dan Muslim)”. *Hadits* diatas menjelaskan bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa dari pembagian harta warisan tersebut maka harta warisan tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris.

3. *Ijtihad*

Al-Qur'an dan *Sunnah* dianggap telah mencukupi sebagai sumber hukum yang memberi pandangan hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial para umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan, tetapi kehidupan manusia yang dinamis membutuhkan hukum yang berubah dengan perubahan kondisi zaman, karena itu diperlukan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan umat Islam untuk membuat hukum-hukum baru yang

relevan dengan kebutuhan zaman. Menghadapi perubahan sosial-budaya yang demikian, diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum *Syariat* (aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT) dan dalil-dalil *Al-Qur'an* serta *Hadits*, inilah yang dinamakan *Ijtihad*.

Ijtihad adalah sumber dari hukum kewarisan yang fungsinya menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh *Nash* (dalil yang jelas dan tegas yang menjadi dasar hukum) yang *Shahih* (kuat atau terpercaya), para *Mujtahid* (ulama atau ahli hukum Islam) dalam menjalankan *Ijtihad* dapat dikelompokkan pada tiga masalah, pertama adalah masalah telah terjadi tetapi *Al-Qur'an* dan *Hadits* yang berhubungan dengan peristiwa tersebut masih bersifat *Zanni* (yaitu dalil atau hukum yang masih bersifat dugaan kuat dan belum mencapai kepastian mutlak) yang masih terbuka kemungkinan untuk ditafsirkan. Kedua adalah masalah yang telah terjadi, tidak ada *Nash* sama sekali dan dalam hal ini *Mujtahid* memiliki kebebasan yang relatif mutlak. Ketiga adalah masalah yang telah terjadi, sudah ada *Nash* yang *Gathi* (dalil atau hukum yang bersifat pasti dan tidak ada keraguan).

Contoh pemakaian *Ijtihad* oleh para sahabat Nabi Muhammad dalam kewarisan adalah sebagai berikut :

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek, didalam *Al-Qur'an* hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama anak laki-laki, yang dalam hal ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *terhijab* (terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih

dekat atau memiliki prioritas lebih tinggi). Menurut pendapat kebanyakan sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai juru tulis wahyu, ahli *Fiqh*, dan pakar dalam ilmu waris, bahwa saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara *Muqasamah* (metode pembagian sisa warisan secara proporsional setelah bagian yang tetap diberikan kepada ahli waris yang berhak) dengan kakek.

- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dari pada kakek, yang akan diwarisi oleh yang mewaris bersama-sama dengan saudara ayahnya, menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *dihijab* (terhalang atau tidak mendapatkan warisan) oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang meng-*Istimbat*-kan (menyimpulkan hukum dari dalil-dalil *Syar'i* (sesuatu yang sesuai atau berdasarkan hukum Islam (*Syariat*)) dengan menggunakan metode *Ijtihad*) dari *Ijtihad* para ulama *Mutaqqaddimin* (ulama terdahulu yang hidup pada masa awal perkembangan *Mazhab Fiqh* dan berperan dalam menyusun serta mengembangkan dasar-dasar hukum Islam), mereka diberi bagian berdasarkan wasiat *Wajibah* yaitu ketentuan dalam hukum waris Islam yang mewajibkan pemberian harta kepada ahli waris tertentu yang tidak mendapatkan bagian warisan secara otomatis menurut hukum *Faraidh*. Wasiat ini diterapkan terutama bagi cucu yang orang tuanya (anak dari pewaris) telah meninggal lebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia.

Menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam, disebutkan bahwa asas hukum kewarisan Islam berasal dari *Al-Qur'an* dan

Al-Hadits, diantaranya adalah *Ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan akibat kematian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*

Hukum kewarisan Islam berarti bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli waris yang terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, tanpa memerlukan persetujuan atau kehendak dari pewaris maupun ahli waris. Pembagian warisan sudah ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan *Al-Qur'an* dan tidak bisa diubah.

Asas ini terlihat dalam tiga aspek utama:

- a. Peralihan harta terjadi secara pasti setelah pewaris meninggal.
- b. Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara jelas dalam *Syariat*.
- c. Ahli waris ditetapkan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, sehingga tidak bisa diganti atau dihilangkan berdasarkan kehendak pribadi pewaris.

Melalui asas ini, hukum Islam menjamin keadilan dalam pembagian warisan dan menghindari konflik di antara ahli waris.

2. Asas Bilateral

Asas dimana seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. Asas ini terdapat dalam *QS.An-Nisa* (4) ayat 7,11,12, dan 176.

3. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut bagian masing-masing, dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Sistem kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tertentu, di mana harta warisan dikuasai bersama tanpa pembagian yang jelas, tidak sesuai dengan ajaran Islam, hal ini berisiko merugikan ahli waris tertentu terutama anak yatim karena hak mereka bisa terabaikan atau bahkan disalahgunakan.

4. Asas keadilan yang berimbang

Asas yang berarti bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya dalam keluarga dan masyarakat. Pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada kesetaraan jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kewajiban yang harus dipikul oleh masing-masing ahli waris. Laki-laki dalam Islam diberikan bagian warisan yang lebih besar karena memiliki kewajiban utama dalam menafkahi keluarga, termasuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *QS. Al-Baqarah* [2]: 233 dan *QS. At-Talaq* [65]: 7, yang menegaskan bahwa seorang suami atau ayah bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya sesuai kemampuannya. Kewajiban ini bersifat mutlak, terlepas dari kondisi ekonomi istri atau anak-anaknya.

Perempuan dalam Islam tidak dibebani kewajiban nafkah, bagian warisan yang mereka terima bersifat individual dan tidak harus menanggung kehidupan keluarga. Perbedaan jumlah warisan yang diterima laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan keseimbangan hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, dengan sistem ini, manfaat dari warisan tetap dirasakan secara adil oleh semua ahli waris sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

5. Asas akibat kematian

Asas ini menegaskan bahwa warisan dalam Islam hanya terjadi jika seseorang telah meninggal dunia, perpindahan harta kepada ahli waris tidak bisa dilakukan selama pemilik harta masih hidup, jika seseorang masih hidup dan ingin memberikan hartanya kepada orang lain, itu bukan dianggap sebagai warisan, melainkan hibah atau hadiah. Menurut pakar hukum waris Islam, konsep ini sama seperti sistem kewarisan *Ab-intestato*, yaitu warisan terjadi otomatis setelah kematian seseorang sesuai dengan ketentuan *Syariat*. Islam tidak mengenal sistem warisan berdasarkan kehendak pribadi atau testamen (wasiat) seperti dalam hukum perdata barat, di mana seseorang bisa menentukan sepenuhnya siapa yang akan mewarisi hartanya.

Islam tetap memberikan ruang bagi seseorang untuk mengatur sebagian kecil hartanya melalui wasiat, dengan batasan tertentu, yaitu maksimal sepertiga dari total harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah memiliki bagian warisan. Wasiat ini memiliki aturan tersendiri dan dibahas dalam hukum Islam sebagai bagian yang terpisah dari hukum kewarisan. Prinsip ini juga

berkaitan dengan asas *Ijbari*, yang menyatakan bahwa pembagian warisan sudah ditentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah berdasarkan keinginan pribadi pewaris, pewaris tidak bisa bebas menentukan bagaimana hartanya akan dibagi setelah kematiannya.

Ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga:³⁹

1. “Hubungan kekerabatan (*Al-Qarabah*).
Hubungan darah, baik dari jalur atas (orang tua, kakek-nenek), tengah (saudara kandung, sepupu), maupun bawah (anak, cucu).
2. Hubungan perkawinan atau semenda (*Al-Musaharah*).
Hubungan kewarisan juga berlaku antara suami dan istri, bahkan setelah perceraian dengan talak *raj'i* selama masih dalam masa iddah, jika terjadi perceraian dengan talak *raj'i* (talak yang masih memungkinkan rujuk), hak waris masih tetap ada selama istri masih dalam masa iddah.
3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*Al-Wala*).
Tuan yang memerdekakan budaknya berhak menerima warisan jika budak tersebut meninggal dunia atau karena perjanjian tolong-menolong, namun hal ini sudah jarang sekali di temukan.”

Terdapat tiga rukun utama dalam waris Islam yang harus dipenuhi agar pewarisan dapat terjadi, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka warisan tidak dapat dibagikan. Ketiga rukun tersebut adalah:⁴⁰

1. *Al-Muwarrits* (Pewaris)
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Harta yang diwariskan harus merupakan kepemilikan pribadi pewaris, bukan milik negara atau instansi.
2. *Al-Warits* (Ahli Waris)
Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) seperti anak, orang tua, atau saudara, serta hubungan perkawinan seperti suami atau istri.
3. *Al-Mauruts* (Harta Waris)
Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris dan sah untuk diwariskan, seperti uang, tanah, atau aset lainnya. Harta yang benar-benar milik pewaris yang dapat diwariskan. Sebagai contoh, dalam harta

³⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* Edisi Revisi, *Op. Cit*, hal. 41

⁴⁰*Ibid*, hal. 22-23.

bersama suami-istri, bagian suami harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli warisnya, sementara bagian istri tidak dalam warisan.”

Terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, yaitu:⁴¹

1. “Pewaris telah meninggal dunia

Pewarisan hanya terjadi jika pewaris telah meninggal dunia, jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris saat masih hidup, itu disebut hibah, bukan warisan. Kematian pewaris dapat dikategorikan menjadi tiga:

- a. Mati *Haqiqi*: Kematian nyata yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b. Mati *Hukmi*: Kematian berdasarkan putusan hakim, misalnya seseorang yang hilang dalam waktu lama.
- c. Mati *Taqdiri*: Kematian berdasarkan dugaan kuat, seperti seseorang yang hilang dalam bencana tanpa ditemukan jasadnya”.

“Beberapa masalah dalam pewarisan terkait kematian pewaris:

- 1) *Mafqud* (orang hilang): Apabila keberadaan seorang ahli waris tidak diketahui, maka dianggap masih hidup dalam batas waktu yang wajar hingga kepastian statusnya ditetapkan.
- 2) Anak dalam kandungan: Apabila istri pewaris sedang hamil, pembagian warisan ditunda hingga anak lahir untuk menentukan haknya.
- 3) Kematian bersamaan: Apabila pewaris dan ahli waris meninggal bersama, misalnya akibat kecelakaan, maka penentuan ahli waris lainnya dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.”

2. “Hubungan pewaris dan ahli waris

Ahli waris harus memiliki hubungan dengan pewaris melalui:

- a. Kekerabatan *nasab* (anak, orang tua, saudara, dan lain lain).
- b. Hubungan pernikahan, yaitu suami atau istri.
- c. Pemerdekaan budak, jarang ditemui saat ini.
- d. Meskipun seseorang memenuhi hubungan pewarisan, ada hal-hal yang dapat menghalangi hak waris, seperti jika seorang ahli waris membunuh pewarisnya.”

3. “Tidak ada penghalang waris

Selain pembunuhan, penghalang waris lainnya meliputi:

- a. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.
- b. Status perbudakan dalam konteks hukum Islam klasik.”

⁴¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Almaarif, 1981), hal. 79

4. “Keabsahan ahli waris ditetapkan oleh hakim

Apabila terdapat sengketa atau ketidakjelasan mengenai status ahli waris, keputusan akhir dapat ditetapkan oleh hakim berdasarkan bukti yang cukup. Pernyataan saksi saja tidak cukup tanpa adanya alasan hukum yang jelas.”

Menurut Sri Lum'atus Sa'adah dalam bukunya yang berjudul “Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia”, ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hubungan mereka dengan pewaris yaitu:

1. *Dzawil Furudh*: adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam *Al-Quran* serta telah ditetapkan bagiannya masing-masing. Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam. Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam *Al-Quran*, di antaranya, terdapat dalam *QS. An-Nisa* ayat 11.
2. *Asabah*: adalah kelompok ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dalam *Al-Qur'an* atau *Hadits*, mereka mendapatkan warisan berdasarkan sisa harta yang belum terbagi setelah ahli waris yang memiliki bagian tetap menerima hak mereka, jika hanya ada *Asabah*, maka mereka akan menerima seluruh harta warisan. *Asabah* dibagi menjadi tiga berdasarkan cara mereka memperoleh hak warisan, yaitu:

a. *Ashabah binafsihi* (*Ashabah* karena diri sendiri)

Kelompok ini terdiri dari ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan sisa warisan atau seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain, mereka tidak memerlukan pendamping untuk menjadi *Ashabah*, karena hak waris mereka sudah melekat secara langsung.

Urutan prioritas dalam *Ashabah binafsihi* adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (jika anak laki-laki tidak ada)
- 3) Ayah
- 4) Kakek (jika ayah tidak ada)
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki se-ayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah
- 9) Paman kandung (saudara laki-laki ayah sekandung)
- 10) Paman se-ayah (saudara laki-laki ayah se-ayah)
- 11) Anak laki-laki dari paman kandung
- 12) Anak laki-laki dari paman se-ayah

Contoh kasus:

Seorang pewaris meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, karena anak laki-laki termasuk *Ashabah binafsihi*, mendapatkan sisa warisan setelah bagian tetap diberikan kepada ahli waris lain, jika tidak ada ahli waris lain, anak laki-laki berhak atas seluruh harta peninggalan.

b. *Ashabah bil ghairi* (*Ashabah* karena laki-laki yang mendampinginya)

Kelompok ini terdiri dari perempuan yang awalnya bukan *Ashabah*, tetapi menjadi *Ashabah* karena didampingi oleh ahli waris laki-laki yang setara dalam hubungan keluarga.

Termasuk dalam *Ashabah bil ghairi*:

- 1) Anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung jika bersama saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara perempuan se-ayah jika bersama saudara laki-laki se-ayah.

Contoh Kasus:

Seorang pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki adalah *Ashabah binafsihi*, sementara anak perempuan menjadi *Ashabah bil ghairi* karena mendapat bagian sebagai sisa warisan bersama saudara laki-lakinya. Bagian mereka dihitung dalam perbandingan 1 : 2 (satu banding dua), artinya anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan.

c. *Ashabah ma'al ghair* (*Ashabah* karena bersama ahli waris tertentu)

Kelompok ini terdiri dari ahli waris perempuan yang awalnya bukan *Ashabah*, tetapi berubah menjadi *Ashabah* karena bersama ahli waris perempuan lain yang bukan *Ashabah*. Termasuk dalam *Asabah ma'al ghair* adalah saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan se-ayah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Contoh Kasus:

Seorang pewaris meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan sekandung, anak perempuan memiliki bagian tetap (*Ashabul Furudh/Dzawil Furudh*). Saudara perempuan sekandung yang awalnya bukan *Ashabah*, berubah menjadi *Ashabah ma'al ghairi* karena keberadaan anak perempuan, mereka akan berbagi sisa harta setelah bagian tetap diberikan.

3. *Dzawil Arham*

Adalah kelompok ahli waris yang mempunyai hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, tetapi tidak mempunyai bagian yang telah ditentukan berdasarkan *Al-Quran* dan *Hadits* serta tidak termasuk kelompok ahli waris *Ashabah*. Ahli waris yang tidak memiliki hubungan darah yang dekat dengan pewaris, seperti sepupu dan keponakan.

Pada hukum Islam, status anak yang lahir di luar pernikahan yang sah memiliki konsekuensi hukum tersendiri, terutama dalam hal *Nasab* dan hak waris. Anak yang lahir dari hubungan zina maupun *Incest* tidak memiliki hubungan *Nasab* dengan ayah biologisnya dan hanya berhak mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keturunan yang sah dan tatanan sosial dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut dari Mizan Ansori:

“Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut *Syariat*, jika seorang perempuan hamil akibat zina dan kemudian menikah dengan pria yang menzinahnya, anak tetap dianggap sebagai anak zina. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan *Incest*, yaitu hubungan seksual antara dua orang yang memiliki pertalian darah dekat, seperti ayah dengan anak perempuan atau saudara kandung.

Menurut sebagian ulama, status anak hasil *Incest* sama dengan anak zina karena hubungan tersebut dianggap batal demi hukum”.⁴²

“Pasal 186 KHI, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hak waris terhadap ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak memiliki hubungan *Nasab* dan hak waris dengan ayah biologisnya. Hukum Islam menegaskan bahwa perzinahan dan *Incest* merusak keturunan dan tatanan sosial, sehingga hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut diatur secara berbeda dari anak sah dalam pewarisan dan nasab”.⁴³

Hukum waris Islam (Ilmu *Faraidh*) mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan *Ijtihad*, ilmu ini mencakup penentuan ahli waris, bagian masing-masing, dan cara pembagian. Asas-asas utama hukum waris Islam meliputi *Ijbari* (otomatis), bilateral (mewaris dari kedua sisi keluarga), individual (harta dibagi perorangan), keadilan berimbang (bagian sesuai hak dan tanggung jawab), dan akibat kematian. Rukun waris meliputi pewaris, ahli waris, dan harta waris, dengan syarat pewaris meninggal, adanya hubungan dengan ahli waris, tidak ada penghalang waris, dan keabsahan ahli waris ditetapkan. Ahli waris dikelompokkan menjadi *Dzawil Furud* (bagian pasti), *Ashabah* (sisa warisan), dan *Dzawil Arham* (kerabat jauh). Anak yang lahir di luar nikah hanya mewarisi dari ibu dan keluarganya.

2.2.2 Perbandingan Hak Waris Istri dalam Pernikahan Tanpa Keturunan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

F.X. Suhardana dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Buku Panduan Mahasiswa”, menjelaskan bahwa pluralistik yang terdapat dalam perkembangan hukum kewarisan di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini,

⁴²Mizan Ansori, *Hukum waris dalam Tanya jawab*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1996), hal. 114

⁴³*Ibid*

hal ini karena pengaruh beragamnya penggolongan masyarakat Indonesia dan adanya dinamika yang berkembang dalam sistem hukum yang berbeda dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Berlakunya Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS), bersama dengan pasal lain seperti Pasal 163 IS, menjadi salah satu faktor yang melahirkan pluralisme hukum di bidang keperdataan, khususnya hukum waris.

Habib Adjie menjelaskan penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 IS adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. “Golongan Eropa meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi bukan dari Belanda, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda, yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga dan asas-asasnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut Undang-Undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda;”
2. “Golongan Bumiputera, meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera, golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan;”
3. “Golongan Timur Asing, meliputi penduduk yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa seperti Arab dan India.”

Habib Adjie juga menjelaskan Pasal 131 IS terhadap 3 (tiga) golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk sebagaimana di sebutkan sebelumnya, sebagai berikut:⁴⁵

1. “Hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu

⁴⁴Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hal. 5

⁴⁵*Ibid*, hal. 6-7

kitab undang-undang, untuk golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordansi).”

2. “Golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.”
3. “Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Eropa, penundukan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.”

Penjelasan Habib Adjie diatas dapat di pahami bahwa, Pasal 163 IS menggolongkan penduduk Hindia Belanda menjadi tiga kelompok hukum:

1. Golongan Eropa adalah orang Belanda, keturunan Eropa non-Belanda, Jepang, dan orang asing lain yang sistem hukumnya sama dengan Belanda.
2. Golongan Bumiputera adalah penduduk asli Hindia Belanda yang tidak pindah ke golongan lain, serta penduduk yang telah melebur dengan budaya dan hukum Bumiputera.
3. Golongan Timur Asing adalah penduduk non-Eropa dan non-Bumiputera, terbagi menjadi Tionghoa dan bukan Tionghoa (Arab dan India).

Keberlakuan hukum bagi tiap golongan diatur dalam Pasal 131 IS sebagai berikut:

1. Golongan Eropa menundukan pada hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi.
2. Golongan Bumiputera dan Timur Asing dapat memberlakukan hukum Eropa jika diperlukan, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan.

3. Golongan Bumiputera dan Timur Asing juga dapat secara sukarela menundukkan pada hukum Eropa, baik sepenuhnya maupun untuk hal-hal tertentu saja.

Pengaturan ini mencerminkan sistem hukum kolonial yang membedakan hukum berdasarkan golongan penduduk.

Penggolongan-penggolongan yang ada pada akhirnya memunculkan pluralisme dalam hukum termasuk di bidang hukum kewarisan, sesuai tulisan Carwan dan Sari Indah Lestari pada jurnal yang berjudul “Perkembangan Aneka Warna Hukum (*Rechtbedeling*) di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”:

1. Hukum Waris Adat

Variasi aturan hukum waris dalam berbagai komunitas adat.

2. Hukum Waris Islam

Pembagian waris berdasarkan *Faraidh* serta ketentuan khusus untuk ahli waris perempuan.

3. Hukum Waris Perdata Barat

Ketentuan waris sesuai KUH Perdata, khususnya tentang harta bersama dalam pernikahan.

Sesuai pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari:⁴⁶

1. Hukum Kewarisan KUH Perdata:

“Hukum Kewarisan KUH Perdata ini diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak beragama Islam dan menundukkan diri pada

⁴⁶Adelina Nasution, “*Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*”, Jurnal Al-Qadha, Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 24-27.

hukum kewarisan perdata, dalam Hukum Kewarisan KUH Perdata tersebut berlaku ketentuan dalam KUH Perdata.”

2. Hukum Kewarisan Islam:

“Hukum kewarisan Islam diberlakukan bagi WNI yang beragama Islam. Hukum Kewarisan Islam tunduk pada ketentuan *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan *Ijma* (kesepakatan para ulama), di Indonesia hukum kewarisan Islam ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

3. “Hukum Kewarisan Adat:

“Hukum kewarisan adat pada masing-masing daerah diatur secara berbeda. Hukum kewarisan adat berlaku bagi WNI yang tidak beragama Islam serta tidak menundukan diri pada kewarisan dalam KUH Perdata, maka berlaku hukum kewarisan adat.”

Perbedaan sistem kekerabatan dalam hukum adat, seperti patrilineal dan matrilineal, memunculkan variasi dalam pembagian warisan di berbagai daerah, sebagaimana penjelasan dari Soepomo berikut:

“Hukum Adat berbeda-beda di setiap daerah, beberapa masyarakat menganut sistem patrilineal yang memberikan prioritas kepada ahli waris laki-laki, dilain pihak (misalnya, di Minangkabau) menganut sistem matrilineal. Hal ini menimbulkan variasi dalam pembagian harta warisan yang dapat membingungkan pihak yang terlibat”.⁴⁷

Aturan Hukum Islam mengenai warisan berdasarkan prinsip *Faraidh*, dengan pengaturan bagian-bagian secara rinci, tetapi dalam penerapannya bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai setempat yang menganut hukum adat. KUH Perdata berlaku terutama bagi penduduk non-muslim dan mengatur warisan secara berbeda, dengan pendekatan harta bersama dan ahli waris yang sah tanpa mempertimbangkan perbedaan gender.

Konsep harta bersama dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta mengatur seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama, tanpa memperhitungkan siapa yang memperolehnya, berikut adalah penjelasan mengenai harta bersama:

⁴⁷Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), hal. 33

1. “Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dalam pernikahan tanpa perjanjian pisah harta, semua aset yang diperoleh selama perkawinan menjadi bagian dari harta bersama. Ketika salah satu pasangan meninggal, harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan kepada ahli waris”.⁴⁸
2. “Harta bersama adalah semua aset atau kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan, harta ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua pasangan, tanpa melihat siapa yang secara langsung memperolehnya atau membiayainya. Undang - undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri atau istri saja, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama di peroleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama”.⁴⁹

Rachmadi Usman dalam kutipan berikut menjelaskan bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan kepemilikan harta, dalam perjanjian tersebut, harta yang diperoleh selama pernikahan tetap menjadi milik pribadi masing-masing:⁵⁰

“Terdapat pengecualian jika pasangan membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama pernikahan, yang mengatur pembagian harta secara terpisah (pisah harta), dalam perjanjian ini pasangan dapat menentukan bahwa harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi, bukan harta bersama. Contoh harta bersama mencakup:

1. Gaji dan pendapatan yang diperoleh salah satu atau kedua pasangan.
2. Properti atau kendaraan yang dibeli selama masa perkawinan.
3. Aset investasi atau tabungan yang diperoleh selama pernikahan”.

“Harta bawaan yang dimiliki sebelum menikah, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, biasanya tetap menjadi milik pribadi masing-masing, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.

⁴⁸R.Soetojo Prawirohamidjojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2012), hal . 44

⁴⁹M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal. 29

⁵⁰Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 369

Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis”, hukum Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *Faraidh* sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Qur'an*, khususnya Surah *An-Nisa'(4):12*, menetapkan bagian waris istri tanpa keturunan:

1. “Istri tanpa keturunan dari suami berhak mendapatkan 1/4 (satu per empat) dari harta suami.
2. Sisa dari harta warisan setelah bagian istri diambil akan dibagikan kepada ahli waris lainnya, seperti orang tua pewaris, saudara kandung, atau kerabat lain sesuai aturan.”

Pasal 180 KHI menentukan besarnya bagian waris seorang janda sebagai berikut :“Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”. Penjelasan ketentuan dalam Pasal 180 KHI mengenai bagian waris seorang janda adalah, seorang janda mendapat bagian sesuai ketentuan tersebut setelah terlebih dahulu janda memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama yang didapatkan selama perkawinan.

Menurut Maman Suparman dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Perdata”, bagian waris istri tanpa keturunan adalah sebagai berikut:

1. Suami atau istri yang masih hidup memiliki hak waris penuh atas sebagian dari harta pewaris (Pasal 832 KUH Perdata).
2. Apabila pewaris tidak memiliki anak, maka orang tua pewaris memiliki hak atas warisan sesuai dengan garis lurus ke atas (Pasal 854 KUH Perdata).

3. Apabila orang tua pewaris telah meninggal dunia, hak waris dapat dialihkan kepada saudara kandung pewaris (Pasal 856 KUH Perdata).

Pembagian warisan menurut KUH Perdata dalam pernikahan tanpa keturunan, dibagi antara pasangan yang masih hidup dan kerabat sesuai dengan golongan, pada kasus di mana seorang suami atau istri meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka ahli warisnya dibagi berdasarkan golongan-golongan yang diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut:

1. Golongan I: Suami/istri yang masih hidup

Pasal 832 KUH Perdata, menyebutkan bahwa “suami atau istri yang masih hidup, dalam hal pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, berhak atas seluruh harta warisan, kecuali jika pewaris meninggalkan orang tua”.

2. Golongan II: Orang tua pewaris

Pasal 852 KUH Perdata, mengatur bahwa “jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka orang tua pewaris menjadi ahli waris bersama-sama dengan suami atau istri yang masih hidup. Pembagian dengan pasangan dalam kondisi ini, suami atau istri yang masih hidup mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta warisan, dan orang tua pewaris (ayah dan ibu) secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian sisanya. Apabila salah satu orang tua telah meninggal, maka bagiannya akan jatuh kepada keturunannya” (misalnya saudara kandung pewaris, sesuai Pasal 856).

3. Golongan III: Saudara kandung pewaris

Pasal 856 KUH Perdata, menyatakan bahwa “jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun orang tua, maka saudara-saudara kandung pewaris (baik saudara kandung seayah dan seibu, maupun saudara kandung seayah atau seibu saja) menjadi ahli waris. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka seluruh harta warisan akan jatuh kepada saudara-saudara kandungnya”.

Berikut adalah yang harus diperhatikan dari uraian diatas:

- a. Apabila hanya ada pasangan yang masih hidup, pasangan mewarisi seluruh harta warisan.
- b. Apabila ada pasangan yang masih hidup dan juga orang tua pewaris, maka pasangan mewarisi $\frac{1}{2}$ (satu per dua), dan orang tua (bersama-sama) mewarisi $\frac{1}{2}$ (satu per dua).
- c. Apabila ada pasangan yang masih hidup, orang tua pewaris meninggal, tetapi ada saudara kandung, pasangan tetap mewarisi $\frac{1}{2}$ (satu per dua), dan bagian orang tua akan beralih ke saudara kandung $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ($\frac{1}{2}$ atau satu per dua dibagi di antara saudara kandung).
- d. Apabila hanya ada saudara kandung (pasangan dan orang tua telah meninggal), maka saudara kandung mewarisi seluruh harta warisan.
- e. Hukum Waris Perdata sangat menekankan pada golongan kekerabatan. Golongan ahli waris yang lebih dekat akan mengesampingkan golongan yang lebih jauh.

- f. Apabila terjadi sengketa atau keraguan dalam pembagian warisan, hakim di pengadilan negeri akan memutuskan berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan bukti-bukti yang diajukan.

Menurut penulis, dalam hukum waris perdata, istri dalam perkawinan tanpa anak tetap memiliki hak waris, tetapi kedudukannya bergantung pada ada atau tidaknya ahli waris lain dari pewaris. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, suami atau istri yang masih hidup memang memiliki hak waris, tetapi bukan sebagai ahli waris tunggal jika masih ada ahli waris lain yang berhak, seperti orang tua pewaris (Pasal 852 KUH Perdata) atau saudara kandung pewaris (Pasal 856 KUH Perdata).

Istri dapat menjadi ahli waris tunggal dengan hak waris penuh, jika pewaris tidak memiliki anak, kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia, dan pewaris tidak memiliki saudara kandung yang berhak atas warisan. Situasi seperti tersebut, istri akan menjadi satu-satunya ahli waris yang berhak atas seluruh harta peninggalan suaminya, sehingga penting untuk memahami struktur ahli waris dalam hukum waris perdata agar dapat menentukan sejauh mana hak waris istri dalam perkawinan tanpa anak.

Berdasarkan dari penjelasan Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis” dan Maman Suparman dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Perdata”, berikut adalah ilustrasi contoh kasus ketika salah satu pasangan dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta dan tanpa adanya keturunan meninggal dunia, terdapat dua tahap yang harus dilakukan sebelum warisan didistribusikan kepada ahli waris.

Tahap pertama pembagian harta bersama harus dibagi dua antara pasangan yang masih hidup dan bagian yang menjadi hak pewaris yang telah meninggal, pembagian ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap pasangan memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Contoh, jika total harta bersama adalah Rp1 miliar, maka Rp500 juta menjadi hak pasangan yang masih hidup, dan Rp500 juta adalah bagian yang akan dibagikan sebagai warisan.

Tahap kedua pembagian warisan, bagian dari harta pewaris yang telah meninggal (setelah pembagian harta bersama) akan dialokasikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang digunakan dapat berupa

1. Hukum Islam: menggunakan prinsip *Faraidh*, di mana ahli waris memiliki bagian tertentu yang telah diatur (misalnya, bagian istri, anak, atau orang tua).
2. Hukum Perdata: menggunakan ketentuan dalam KUH Perdata bagi non-muslim.

Contoh kasus, jika seorang suami meninggal dunia dalam pernikahan tanpa perjanjian pisah harta, dan dia meninggalkan istri tanpa anak:

1. Harta bersama adalah Rp1 miliar.
2. Setelah pembagian harta bersama, istri mendapat Rp500 juta (bagian dari harta bersama).
3. Sisa Rp500 juta yang merupakan warisan suami, pembagian kepada ahli waris akan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Konsekuensi hukum ini mengatur bahwa harta bersama harus dibagi terlebih dahulu sebelum pembagian warisan, memastikan bahwa pasangan yang masih hidup tetap memiliki hak atas bagian dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Sebagai bahan referensi, berikut adalah perbandingan hak waris Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata:

2.1 Tabel Perbandingan Hak Waris Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

No	Aspek	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata
1	Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad	KUH Perdata (BW)
2	Prinsip Waris	Otomatis berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal	Ahli waris dapat menerima atau menolak warisan
3	Hak Waris Istri	1/4 jika tidak ada anak, 1/8 jika ada anak	Sama dengan anak kandung
4	Sistem Pembagian	Pembagian tetap sesuai hukum <i>Faraidh</i>	Bisa diubah dengan wasiat atau hibah
5	Ahli Waris Pengganti	Tidak berlaku, kecuali dalam wasiat <i>wajibah</i>	Berlaku (anak atau cucu bisa menggantikan orang tua yang meninggal lebih dahulu)
6	Perceraian dan Hak Waris	Masih berhak dalam masa iddah talak <i>raj'i</i> , tetapi tidak dalam talak <i>ba'in</i> (perceraian yang tidak memungkinkan kembali rujuk, kecuali dengan pernikahan baru dan akad nikah baru)	Masih berhak kecuali perceraian diputus oleh pengadilan sebelum pewaris meninggal
7	Perbedaan Agama	Istri beda agama tidak mendapat warisan	Tidak ada larangan, tetap dapat warisan
8	Sistem Hibah/Wasiat	Maksimal 1/3 dari harta, tidak boleh melebihi bagian ahli waris	Bisa mewariskan seluruh hartanya sesuai keinginan pewaris melalui wasiat

2.3 Tinjauan Konseptual Kesetaraan dan Peran Gender dalam Hukum Islam

2.3.1 Pandangan Islam Mengenai Istri Sebagai Pencari Nafkah

Perubahan peran gender dalam masyarakat modern telah mempengaruhi dinamika keluarga, termasuk dalam hal pencarian nafkah, sebagaimana kutipan berikut:

“Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dengan anak-anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya”.⁵¹

“Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) KHI, namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan berkarir/mencari nafkah baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan”.⁵²

Kutipan berikut menjelaskan perspektif hukum Islam mengenai tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, yang secara prinsipil dibebankan kepada suami sebagai kewajiban hukum:

“Menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum, kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut, namun pembebasan ini hanya berlaku terhadap istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya, demikian kompilasi hukum Islam Pasal 80 ayat (6) menjelaskan. Perempuan hanya berkewajiban mengatur untuk kepentingan seluruh anggota keluarga, hal ini ditegaskan di dalam *Hadits*, bahwa Rasulullah bersabda kepada Hind, istri Abi Sufyan yang terjemahannya (kurang lebih) sebagai berikut: “Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara baik”.⁵³

Miqdad Yaljan menekankan kewajiban pria dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Pria bertanggung jawab memberikan nafkah, termasuk makanan dan pakaian, kepada perempuan dengan cara yang baik dan layak sesuai kutipan berikut:

“Sesuai dengan ketentuan didalam *Al-Qur'an* tersebut dalam sebuah *Hadits* yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Aszaqasi disebutkan (artinya)

⁵¹M. Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hal. 3

⁵²Huzaema T. Yanggo, *Figih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), hal. 62

⁵³*Ibid*, hal. 102

sebagai berikut: “dan diwajibkan kepada kamu (pria) untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka (perempuan) secara baik”⁵⁴

Keperluan hidup berumah tangga oleh KHI Pasal 80 ayat (4) disebutkan yaitu meliputi :

- a. “Nafkah, *kiswah* (pakaian yang layak bagi istri dan anak-anaknya), dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”

Nafkah dalam Islam merupakan hak istri dan anak-anak yang harus dipenuhi oleh suami mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan pokok lainnya tanpa memandang kondisi ekonomi istri.

Hal ini sebagaimana kutipan berikut:

“Dalam buku *Syariat Islam*, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang perempuan yang kaya”⁵⁵

“Nafkah merupakan hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga, nafkah bagi perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami-istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan”⁵⁶

Kutipan dibawah ini menjelaskan kewajiban nafkah suami dalam *Fiqh* Islam didasarkan pada prinsip pemisahan harta, di mana suami sebagai pencari nafkah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri, namun dalam konsep penggabungan harta, hal ini menjadi kurang relevan:

⁵⁴Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami (Al-Baitul Islamy)*, Terjemahan SA Zemol, (Solo: Pustaka Mantiq, 1987), hal. 101

⁵⁵Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hal. 121

⁵⁶Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 188

“Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam *Fiqh* didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki, dan untuk memenuhi keperluannya istri berkedudukan sebagai penerima nafkah, sehingga kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga”.⁵⁷

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa istri diperbolehkan untuk berkontribusi mencari nafkah dalam Islam, dengan catatan tidak mengabaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sebagaimana dalam kutipan berikut ini:

“Seorang istri diberi toleransi untuk bisa berkontribusi membantu dalam mencari nafkah, tetapi dengan syarat bahwa tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan perannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, perempuan diizinkan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan, selama kehadirannya tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku”.⁵⁸

“Dalam Islam tidak ada larangan untuk laki-laki maupun perempuan bekerja, semua diperbolehkan bekerja untuk kebutuhan hidupnya, karena dalam Islam diharuskan untuk berusaha apalagi dalam keadaan terpaksa”.⁵⁹

Islam pada dasarnya menetapkan bahwa tanggung jawab mencari nafkah berada di tangan laki-laki sebagai kepala keluarga, namun dalam kondisi tertentu perempuan juga dapat berperan sebagai pencari nafkah. Pandangan ini dapat dijelaskan melalui tiga sumber utama hukum Islam menurut M. Quraish Shihab, dalam bukunya “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*” :

1. *Al-Qur'an*

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal. 166

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 307

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 377

a. Pemikiran dan Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap *QS An-Nisa/4;34*

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz* (ketidaktaatan), hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”

Pertanyaannya adalah, mengapa *Al-Qur'an* mengatakan adanya keunggulan nafkah kepada laki-laki, karena kesadaran sosial dan penafsiran kaum perempuan pada saat itu rendah dan pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kewajiban perempuan semata. Laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. *Al-Qur'an* mencerminkan situasi sosial itu hanya menyatakan bahwa laki-laki adalah *Qowwam* (pemberi nafkah atau pengatur rumah tangga) dan tidak mengatakan mereka harus menjadi *Qowwam*, dimana *Qowwam* merupakan sebuah pernyataan kontekstual bukan normatif.

Pada prinsipnya perempuan bekerja hukumnya boleh (*Mubah*), bahkan terkadang bekerja itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat membutuhkannya, seperti seorang janda, seorang yang diceraikan suaminya, atau memutuskan untuk tidak menikah. Bekerja dapat menyelamatkan dirinya dari kehinaan selama tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama dan asusila dan harus mendapatkan izin dari walinya apabila perempuan itu mempunyai wali.

Kesimpulannya bahwa dalam QS. *An-Nisa*: 34 perempuan boleh bekerja, bahkan perempuan berkewajiban untuk bekerja, jika dia tidak memiliki sumber penghidupan, tidak memiliki keluarga, sementara dia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perempuan berhak dan berkewajiban untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pengajaran terutama bagi seorang wali yang tidak dapat memberikan pengajaran, maka wali tersebut harus mengizinkan untuk belajar kepada guru yang mengajarnya.

b. Pemikiran dan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. *Al-Ahzab* / 33:33

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang *Jahiliyah* yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *Ahlul bait* (orang-orang di rumah) dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Tetaplah berada di rumah, jangan meninggalkan tempat tinggal kecuali jika ada kepentingan yang dibenarkan oleh Allah yang mengharuskan kalian keluar rumah, jangan memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian kepada kaum lelaki jika kalian berada di luar, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang *Jahiliyah* (masa sebelum datangnya ajaran Islam) dahulu. Laksanakan salat dengan sempurna, tunaikan zakat, laksanakan segala perintah Allah dan Rasul serta tinggalkan segala yang dilarang, dengan perintah dan larangan itu Allah bermaksud memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada kalian.

Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utamanya adalah dalam rumah tangga yang dianggap sebagai pekerjaan produktif. Pada rumah tangga, tugas istri dibakukan dalam lima komponen aktivitas, pertama adalah melayani suami, kedua adalah mengurus

dan mendidik anak, ketiga adalah membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga, keempat adalah menyediakan makanan, dan kelima adalah merawat kesehatan lahir batin bagi anggota keluarganya.

Perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya dan perempuan tersebut membutuhkan pekerjaan itu, baik didalam atau diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan syarat atas izin suami. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

2. *Hadits* Nabi Muhammad SAW

HR. Bukhari, riwayat tentang Khadijah binti Khuwailid sebagai saudagar sukses dan dukungannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW, adalah seorang saudagar sukses dan kaya raya yang dikenal karena kearifan dan kebijaksanaannya. Ia memberikan dukungan penuh kepada Nabi Muhammad SAW dalam dakwah Islam.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mereka adalah *Syaqa'IAL-Rija* (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama, walaupun ada yang membedakan maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelaminnya, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.

Menurut penjelasan diatas, meskipun hukum Islam secara prinsipil memberikan tanggung jawab nafkah keluarga kepada suami, perubahan peran

gender dalam masyarakat modern menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam mencari nafkah. Hukum Islam memberikan toleransi bagi istri untuk berkontribusi dalam mencari nafkah selama tidak mengabaikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga dan mendapatkan izin suami, tanggung jawab utama suami atas nafkah tetap berlaku berdasarkan prinsip pemisahan harta, namun dalam kondisi tertentu, perempuan diperbolehkan bahkan diwajibkan bekerja jika dibutuhkan dan sesuai dengan norma agama serta sosial. Islam mengakomodasi peran ganda perempuan dalam keluarga dan masyarakat, dengan tetap menghargai tanggung jawab utama suami sebagai kepala keluarga.

2.3.2 Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Tunggal dalam Konteks Ekonomi Menurut Hukum Islam

Menurut Budiarti dalam bukunya yang berjudul “Konstruksi Penemuan Hukum Melalui *Ijtihad*”, dimana KHI dalam perspektif *Ijtihad* yaitu upaya intelektual yang mendalam dan sungguh-sungguh dari para ahli hukum Islam untuk menggali dan menetapkan hukum *Syariat* (aturan hukum Islam), terhadap isu-isu kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* (seluruh perilaku, kebiasaan, dan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik yang tercatat dalam Hadits maupun tidak), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

KHI adalah kumpulan aturan hukum Islam yang disusun oleh pemerintah Indonesia sebagai pedoman bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga, termasuk perkawinan, waris, dan wakaf. KHI tidak sepenuhnya

bersumber langsung dari *Al-Qur'an* dan *Hadits*, tetapi merupakan hasil *Ijtihad* ulama dan legislasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, dalam KHI tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang perempuan untuk bekerja, sebaliknya KHI memberikan ruang bagi perempuan untuk menjalankan peran di ranah publik termasuk dalam aspek ekonomi.

Menurut Jurnal yang di tulis oleh Rahmat Hidayat, Jayuman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin dengan judul “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, beberapa aturan yang menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja dalam hukum Islam di Indonesia:

1. Kebebasan dalam bekerja dan berusaha, meskipun KHI tidak secara langsung membahas perempuan bekerja, namun dalam Pasal 80 ayat (4) KHI disebutkan:

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Makna pasal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama nafkah ada pada suami, tetapi tidak membatasi istri untuk turut berkontribusi secara finansial, jika suami memiliki keterbatasan ekonomi, istri dapat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2. Hak perempuan dalam mengelola harta sendiri, dalam Pasal 86 KHI, dijelaskan:

"Harta bawaan dari suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Makna pasal ini adalah, perempuan memiliki hak penuh atas harta yang diperoleh, termasuk dari hasil pekerjaannya sendiri, suami tidak berhak menguasai atau mengatur penghasilan istri kecuali ada kesepakatan.

3. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dalam Pasal 77 ayat (1) KHI, disebutkan bahwa:

"Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar utama dalam rumah tangga Islam."

Makna pasal ini adalah, tidak ada pembatasan bahwa istri harus hanya berperan di ranah domestik. Peran dalam rumah tangga bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri.

KHI tidak melarang perempuan untuk bekerja, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan kesepakatan dalam rumah tangga. Perempuan memiliki hak penuh atas penghasilan dan harta yang diperolehnya. Perempuan bekerja tidak menghapus kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi dapat menjadi pendukung dalam ekonomi keluarga.

Masih pada jurnal tersebut dan tambahan jurnal dari Samsul Bahri yang berjudul "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)" di jelaskan bahwa UU Perkawinan tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, undang-undang ini memberikan fleksibilitas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam keluarga maupun masyarakat, berikut adalah beberapa pasal yang mendukung hak perempuan untuk bekerja:

1. Hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, Pasal 31 Ayat (1) dan

(2) UU Perkawinan:

- 1) “Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat.”
- 2) “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Makna dari pasal ini adalah, suami dan istri memiliki kedudukan seimbang, artinya istri tidak dilarang untuk berkarir atau bekerja di luar rumah. Istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam aspek ekonomi seperti memiliki usaha atau pekerjaan sendiri.

2. Kewajiban suami sebagai pencari nafkah, Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan:

- 1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
- 2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”

Makna dari pasal ini adalah, undang-undang menetapkan bahwa suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, namun tidak disebutkan bahwa istri tidak boleh bekerja, sebaliknya istri tetap bisa berkontribusi ekonomi tanpa menghilangkan peran utama suami sebagai pencari nafkah.

3. Hak perempuan dalam mengelola hartanya sendiri, Pasal 36 Ayat (1) dan

(2) UU Perkawinan:

- 1) “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”
- 2) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Makna pasal ini adalah, Istri berhak penuh atas penghasilan atau harta yang diperolehnya termasuk dari hasil bekerja, jika perempuan bekerja dan mendapatkan penghasilan, harta tersebut menjadi miliknya sendiri dan tidak wajib diberikan kepada suami atau keluarga, kecuali ada kesepakatan.

Berdasarkan UU Perkawinan, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja. Istri tetap bisa berkarir atau berwirausaha, selama tidak mengabaikan tanggung jawab dalam rumah tangga. Suami tetap menjadi pencari nafkah utama, tetapi perempuan juga memiliki kebebasan untuk mendapatkan penghasilan sendiri dan mengelola hartanya sesuai dengan hukum.

Menurut Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, dan Nunu Nugraha dalam jurnal yang berjudul “Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab”, tanggung jawab nafkah berada di pundak suami, namun secara umum ada tiga kondisi utama yang bisa terjadi terkait istri menafkahi suami:

1. Suami tidak mampu mencari nafkah (*Uzur Syari’i*)

Apabila suami sakit, cacat, kehilangan pekerjaan, atau mengalami kesulitan finansial sementara, maka istri boleh menafkahnya sebagai bentuk sedekah dan kebaikan. Seorang istri yang membantu suaminya, dalam Islam akan mendapatkan pahala, sebagaimana *Hadits* Nabi:

HR. Bukhari & Muslim: "Apabila seorang perempuan menginfakkan hartanya untuk keluarganya (termasuk suaminya) dengan niat baik, maka baginya pahala sedekah."

Istri memberi nafkah dalam kondisi ini, itu adalah sedekah, bukan kewajiban.

2. Suami sengaja tidak mau bekerja

Apabila suami sehat dan mampu bekerja tetapi sengaja tidak mencari nafkah, maka ini bertentangan dengan hukum Islam. Seorang suami yang tidak menafkahi istri dan keluarganya dapat dianggap melakukan pelanggaran *Syariah* (hukum Islam).

HR. Muslim: "Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya."

Istri tidak wajib menafkahi suami jika suami sengaja malas dan tidak mau bekerja, dalam Islam, hal ini bisa menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan *Fasakh* (pembatalan pernikahan).

3. Istri dan suami sepakat berbagi peran

Suami dan istri bisa sepakat bahwa istri bekerja dan menafkahi keluarga sementara suami mengurus rumah tangga. Hal ini boleh dilakukan jika ada kesepakatan tanpa ada unsur pemaksaan. Istri boleh membantu suami berdasarkan kesepakatan, tetapi suami tetap bertanggung jawab utama dalam mencari nafkah.

Istri tidak wajib menafkahi suami dalam Islam karena itu adalah tanggung jawab suami, Istri boleh membantu suami dalam kondisi tertentu, seperti jika suami sakit atau mengalami kesulitan ekonomi, jika suami malas bekerja dan tidak bertanggung jawab maka istri berhak menuntut cerai karena suami telah melanggar kewajibannya. Hukum Islam dan hukum Indonesia, suami tetap memiliki tanggung jawab utama dalam nafkah, meskipun istri boleh membantu secara sukarela. Prinsip utama dalam Islam adalah keseimbangan dan keadilan

dalam rumah tangga, jika istri bekerja dan menafkahi keluarga, suami tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

2.3.3 Hak Waris Istri Sebagai Pencari Nafkah Tunggal dalam Perkawinan Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam

Menurut Mamat Ruhimat dalam Jurnal Hukum dan Kemanusiaan dengan judul “Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama”:

“Harta bersama merupakan istilah yang menunjuk kepada harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan, dalam hukum positif, harta bersama diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 35-37”.⁶⁰

“Istilah harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dikenal, di dalam hukum Islam hubungannya dengan pemilikan harta dikenal harta berdasarkan pemilikannya, yaitu harta milik pribadi (khas) dan harta milik umum (‘am). Hal ini diperkuat pula dalam KHI Pasal 86 Ayat 1 berbunyi: ”Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”, dalam hukum Islam dikenal istilah *Syirkah* atau *Musyarakah* yang artinya perserikatan suatu harta, istilah tersebut artinya perserikatan suatu harta dimana menurut *Fiqh* yang disebut *Syirkah* yaitu “akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.⁶¹

“Hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan, kitab-kitab *Fiqh* baik di dalam bidang *Syirkah* maupun di bidang-bidang lainnya seperti dalam Kitab *Al-Nikah* (membahas hukum pernikahan dalam Islam), Kitab *Al-Faraidh* (membahas hukum kewarisan (pembagian harta warisan) menurut *Syariat* Islam), dan dalam bab-bab lainnya sama sekali tidak ditemukan ulasan dan pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Adapun kedudukan dan pembagian harta bersama dalam peraturan perundang-

⁶⁰Mamat Ruhimat, “Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama”, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 11 No. 1 (2017), hal. 80 (Hidayat, et al. 2021)

⁶¹*Ibid*

undangan, setidaknya diatur dalam tiga (3) bentuk regulasi, pertama yaitu dalam KUH Perdata khususnya Pasal 119 sampai dengan Pasal 122; kedua yaitu dalam UU Perkawinan khususnya Pasal 35, 36 dan Pasal 37, dan pada Bab XIII Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c; dan ketiga yaitu dalam KHI khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97”.⁶²

“Implementasi dan kontribusi teori *Syirkah* dalam pembagian harta bersama di lembaga pengadilan agama terwujud dalam bentuk putusan Mahkamah Agung dan Yurisprudensi menegani harta bersama, karena putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan UU Perkawinan yang di antara salah satu pasalnya mengatur tentang harta bersama, tepatnya Pasal 35, 36, dan 37, dan putusan ini juga tidak jauh berbeda dengan rumusan KHI pada Pasal 96 dan 97 yang sekaligus juga merupakan penerapan Pasal 37 UU Perkawinan”.⁶³

“Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri berdasarkan putusan Nomor 266K/AG/2010. Berdasarkan putusan tersebut, penggugat (istri) berhak mendapat tiga perempat dan tergugat (suami) berhak memiliki seperempat bagian dari harta bersama, hal ini karena selama masa perkawinan kontribusi istri dalam perolehan harta bersama lebih besar. Harta bersama dalam hukum Islam merujuk pada teori *Syirkah* dengan tujuan memelihara kemaslahatan, dan dalam hukum positif merujuk kepada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97”.⁶⁴

Berikut adalah perbandingan mengenai harta bersama dalam KUH Perdata,

UU Perkawinan, dan KHI:

2.2 Tabel Perbandingan Harta Bersama dalam KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI

No	Aspek	KUH Perdata	UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1	Dasar Hukum	Pasal 119 – 138 KUH Perdata	Pasal 35 – 37 UU Perkawinan	Pasal 85 – 97 KHI
2	Asas	Secara otomatis terjadi percampuran harta sejak perkawinan, kecuali ada perjanjian pisah harta sebelum menikah (Pasal 119).	Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan dan hibah/warisan tetap milik masing-masing (Pasal 35).	Tidak ada konsep percampuran harta secara otomatis, tetapi dalam perkawinan tetap dikenal harta bersama (Pasal 85).
3	Pengelolaan Harta	Suami memiliki hak penuh untuk mengelola	Suami dan istri berhak mengelola harta	Suami atau isteri tanpa persetujuan

⁶²*Ibid*, hal 97

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid*, hal.79

	Bersama	harta bersama, tetapi harus dengan persetujuan istri dalam tindakan tertentu seperti menjual atau menggadaikan (Pasal 124).	bersama dengan kesepakatan bersama (Pasal 36).	pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. (Pasal 92).
4	Pembagian Harta Jika Terjadi Perceraian atau meninggal dunia	Suami dan istri tetap memiliki hak atas harta bersama, tetapi pembagian tergantung pada perjanjian pranikah atau keputusan hakim (Pasal 126).	Pembagian harta gono gini secara sama rata dapat disimpulkan dari Pasal 37 UU Perkawinan, yang berbunyi: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, kecuali bila ada perjanjian lain."	Harta bersama dibagi masing-masing separuh, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian atau putusan hakim (Pasal 97).
5	Harta Bawaan	Harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum perkawinan) pada prinsipnya masuk ke dalam harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan). Ketentuan ini dapat diubah melalui perjanjian perkawinan. (Pasal 119).	Harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing suami atau istri (Pasal 35 ayat 2).	Harta bawaan tetap menjadi milik suami atau istri dan tidak menjadi harta bersama (Pasal 87).
6	Utang dalam Perkawinan	Pasal 119–123 KUH Perdata: Dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin, terbentuk harta bersama yang mencakup semua harta dan utang suami istri. Utang yang dibuat sebelum, selama, dan setelah perkawinan menjadi tanggungan harta bersama (Pasal 121). Utang yang timbul setelah salah satu pasangan meninggal dunia menjadi tanggung jawab ahli waris, bukan bagian dari harta bersama (Pasal 123).	Utang yang dibuat untuk kepentingan rumah tangga menjadi tanggungan bersama, tetapi utang pribadi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing (Pasal 36 ayat 2).	Tidak ada pencampuran harta suami istri karena perkawinan (Pasal 86). Utang sebelum menikah menjadi tanggung jawab pribadi (Pasal 93 ayat 1). Utang selama perkawinan untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama; jika tidak cukup, ditanggung suami, lalu istri (Pasal 93 ayat 2–3). Saat perceraian, masing-masing berhak atas setengah harta bersama dan utang bersama diperhitungkan (Pasal 97).
7	Keberlakuan	Berlaku untuk semua	Berlaku untuk semua	Berlaku bagi

		pasangan yang tidak membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah.	pasangan yang menikah menurut hukum negara.	pasangan Muslim yang menikah berdasarkan hukum Islam di Indonesia.
--	--	---	---	--

Praktik kehidupan rumah tangga, bisa saja suami tidak memiliki penghasilan dan istri yang menanggung ekonomi keluarga, jika harta yang dimiliki selama pernikahan adalah hasil usaha istri maka dalam konteks hukum Islam, harta tersebut tetap menjadi hak istri dan bukan sepenuhnya menjadi bagian dari harta warisan suami. Pada sistem hukum waris Islam, jika harta tersebut telah dihibahkan kepada suami atau digunakan bersama tanpa perjanjian, maka akan dianggap sebagai bagian dari harta suami yang bisa diwariskan kepada ahli warisnya.

Menurut Irwan Abd. Rahman dan Yagus Suyadi dalam jurnal ilmu hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Atas Bagian Harta Warisan Terhadap Istri Yang Menanggung Beban Nafkah Tunggal Dalam Keluarga”, di jelaskan bahwa:

“Pembagian warisan istri yang bekerja tidak dapat diberikan bagian lebih dikarenakan tidak jelas penggolongan harta suami dan harta isteri, hal ini sangat sulit untuk dipisahkan karena dalam status kepemilikan harta hanya isteri yang dapat mengklaim kepemilikannya. Kondisi ini disebabkan selama suami masih hidup, suami dan isteri tidak pernah memisahkan harta kepemilikannya. Tidak menutup kemungkinan jika kedua belah pihak suami-istri dapat membagikan harta waris atas dasar rasa sukarela memisahkan dan membagi sesuai bagian-bagiannya ketika semasa hidup ataupun setelah adanya putusan hakim”.⁶⁵

“Solusi yang dapat dilakukan dalam pemecahan kendala tersebut adalah adanya kejelasan status kepemilikan ini dapat memudahkan pembagian harta warisan baik bagi isteri yang bekerja maupun tidak bekerja. Adanya kejelasan status kepemilikan dapat diterapkan pada harta benda yang dapat memiliki identitas seperti tanah, bangunan, kepemilikan usaha, kendaraan

⁶⁵Irwan Abd. Rahman & Yagus Suyadi, “Tinjauan Hukum Islam Atas Bagian Harta Warisan Terhadap Istri Yang Menanggung Beban Nafkah Tunggal Dalam Keluarga”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2018, hal. 62

dan tabungan, jika dalam status kepemilikan harta tersebut atas nama suami, maka status kepemilikannya adalah milik suami”.⁶⁶

Menurut Rahmat Hidayat, Jayuman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin dalam jurnal dengan judul “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”:

“Suami diwajibkan menafkahi istri dan keluarga (QS. *An-Nisa*: 34), jika dalam kenyataannya istri yang menjadi pencari nafkah tunggal, hal ini tidak mengubah kedudukan hukum warisnya, harta yang dimiliki suami tetap menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan hukum Islam, meskipun harta tersebut berasal dari penghasilan istri. Harta yang diperoleh oleh suami dan istri adalah harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Mereka terikat dalam perkawinan sebagai suami-istri, maka semuanya menjadi bersatu, termasuk dalam masalah harta”.⁶⁷

Menurut Muhamad Nashrullah, Ibnu Jazari dan Shofiatul Jannah, dalam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam dengan judul “Pembagian Harta Waris Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”.⁶⁸

1. Bagian suami
 - a. “Jika seorang istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, suami berhak mendapatkan separuh atas bagian harta warisan yang ditinggalkan istrinya.”
 - b. “Jika istri meninggal dunia dan meninggalkan anak, suaminya berhak atas seperempat harta warisan.”
2. Bagian istri
 - a. “Ketika seorang suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, istri akan menerima seperempat dari harta warisan.”
 - b. “Ketika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan anak, istri menerima seperdelapan dari harta warisan.”

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷Rahmat Hidayat, Jayuman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (*El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2021), hal. 88

⁶⁸Menurut Muhamad Nashrullah, Ibnu Jazari dan Shofiatul Jannah, “Pembagian Harta Waris Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023, hal. 266

“Apabila salah satu meninggal dunia, maka harta bersama selama perkawinan harus dipisahkan dari warisan pewaris (orang yang meninggal) untuk dijadikan warisan. Harta bersama yang telah dipisahkan diserahkan kepada pasangan hidup yang masih ada. Ahli waris bagi pasangan yang tidak memiliki anak, naik lebih dulu seperti orang tua, kemudian saudara kandung. Ahli waris selanjutnya seperti keponakan akan dimasukkan apabila orang tua dan saudara kandung telah meninggal dunia atau tidak ada”.⁶⁹

Meskipun istri menjadi pencari nafkah tunggal selama hidup suaminya, hal ini tidak mengubah ketentuan pembagian waris dalam Islam. Hukum waris Islam tetap mengikuti aturan *Faraidh* tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih dominan dalam mencari nafkah. Sistem hukum Islam tidak mengenal konsep pemisahan harta secara otomatis seperti dalam hukum perdata, oleh karena itu, sebelum pembagian warisan dilakukan, harus dipastikan mana yang termasuk harta pribadi pewaris dan mana yang merupakan hasil bersama dalam pernikahan.

Apabila pewaris tidak memiliki ahli waris lain maka sisa harta setelah bagian suami atau istri diambil akan jatuh kepada kerabat terdekat, seperti saudara kandung atau orang tua pewaris, jika tidak ada kerabat yang berhak menerima warisan, maka harta dapat jatuh kepada *Baitul Mal* atau lembaga pengelola warisan dalam Islam.

⁶⁹*Ibid*